



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat	: Ke – 2 (Dua)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BPH Migas
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 27 Mei 2024
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I
Acara	: 1. Realisasi kuota BBM Tahun 2024 dan proyeksi kuota Tahun 2025 2. Pengawasan BBM bersubsidi Tahun 2024. 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: H. Eddy Soeparno, S.H., M.H (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PAN)
Sekretaris Rapat	: Dwiyanti, S.Sos.
Hadir	: A. Pemerintah - Kepala BPH Migas B. 18 Orang Anggota dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR RI terdiri dari: 18 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 34 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Senin 27 Mei 2024 dibuka pukul 13.30 WIB, dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, S.H., M.H., selaku Ketua Rapat Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Realisasi kuota BBM Tahun 2024 dan proyeksi kuota Tahun 2025
 - b. Pengawasan BBM bersubsidi Tahun 2024
 - c. Lain-lain
3. Rapat Dengar Pendapat dilanjutkan oleh Maman Abdurrahman,S.T. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI telah menerima penjelasan terkait capaian kinerja BPH Migas tahun 2023 dalam hal pengendalian volume Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
2. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk mengoptimalkan peran pengawasan BPH Migas sehingga realisasi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) lebih tepat sasaran sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk memberikan masukan pada PT Pertamina (Persero) agar Pertashop yang memenuhi persyaratan dapat menjual Pertalite.
4. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk melakukan pemutakhiran data kebutuhan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) khususnya untuk petani dan nelayan.
5. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penerbitan rekomendasi pengambilan JBT dan JBKP terkait jarak antara nelayan dengan lokasi SPBN.

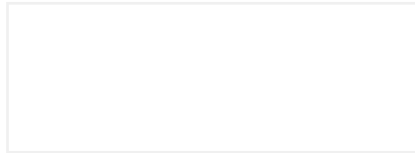
6. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 3 Juni 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.30 WIB

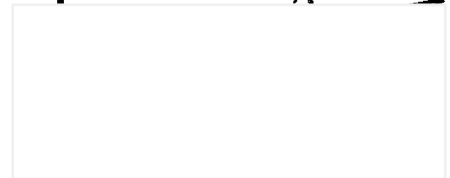
Jakarta, 27 Mei 2024

KEPALA BPH MIGAS



ERIKA RETNOWATI, A.K., M.Si.

KETUA RAPAT,



MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.
A-332